



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2022-2023
KE PROVINSI SULAWESI SELATAN**

*

*

**

**

*

*

JAKARTA 2022



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2022-2023
KE PROVINSI SULAWESI SELATAN
16-20 DESEMBER 2022**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Sulawesi Selatan adalah dalam rangka meninjau dan menghimpun informasi terkait dengan permasalahan di Bidang Pertanian dan Pangan, Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Bidang Kelautan dan Perikanan.

Adapun dasar hukum kunjungan kerja ini adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
 - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 19 September 2022.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 2 November 2022.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Sulawesi Selatan adalah untuk:

1. Mendengarkan penjelasan, berdialog, dan mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat, serta *stakeholder* di bidang pertanian dan pangan, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan

- dan perikanan sehubungan dengan fungsi pengawasan Komisi IV DPR RI di Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Melihat langsung di lapangan manfaat dari realisasi dan pelaksanaan pembangunan bidang kerja Komisi IV DPR RI di Provinsi Sulawesi Selatan; serta
 3. Menyerap aspirasi daerah dalam rangka meningkatkan program-program Pemerintah terkait bidang kerja Komisi IV DPR RI pada tahun anggaran yang akan datang.

C. RUANG LINGKUP

Sasaran kunjungan kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi IV DPR RI, yaitu Bidang Pertanian dan Pangan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kelautan dan Perikanan.

D. SUSUNAN TIM

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh Rusdi Masse Mappasessu (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem) dan diikuti oleh para Anggota Komisi IV DPR RI.

E. PELAKSANAAN KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan pada tanggal 16-20 Desember 2022 dan bertempat di Kota Makassar, Kabupaten Pankajene, Kepulauan dan Kabupaten Pinrang.

F. LOKASI KUNJUNGAN KERJA

1. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan Negeri Makassar, Kota Makassar;
2. Pelabuhan Perikanan, Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
3. Gudang Perum Bulog, Kabupaten Pinrang.

II. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan

Secara geografis, Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota Makassar memiliki

posisi yang sangat strategis. Provinsi Sulawesi Selatan terletak di tengah-tengah Kepulauan Indonesia yakni tepatnya di 0°12' - 8° Lintang Selatan dan 116°48' - 122°36' Bujur Timur yang memiliki luas wilayah 46.717,48 km² dengan masing-masing luasan wilayah kabupaten/kota yang dapat dilihat pada tabel di bawah. Tentunya dilihat secara ekonomis Provinsi Sulawesi Selatan ini memiliki keunggulan komparatif, dimana Selat Makassar telah menjadi salah satu jalur pelayaran internasional. Disamping itu, Kota Makassar telah pula ditetapkan sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI).

**Luas Daerah menurut Kabupaten/Kota
di Sulawesi Selatan Tahun 2014-2019**

Wilayah	Luas Area (km ²)		
	2014	2015	2019
Kepulauan Selayar	90350.00	904.00	1357.03
Bulukumba	1154.67	1155.00	1284.63
Bantaeng	395.83	396.00	395.83
Jeneponto	903.35	903.00	706.52
Takalar	566.51	567.00	566.61
Gowa	1883.32	1883.00	1883.32
Sinjai	819.96	820.00	798.96
Maros	1619.12	1619.00	1619.12
Pangkajene dan Kepulauan	1112.29	1112.00	1132.08
Barru	1174.71	1175.00	1174.71
Bone	4559.00	4559.00	4559.00
Soppeng	1359.44	1359.00	1557.00
Wajo	2506.20	2506.00	2504.06
Sidenreng Rappang	1883.25	1883.00	1883.23
Pinrang	1961.17	1961.00	1961.67
Enrekang	1786.01	1786.00	1784.93
Luwu	3000.25	3000.00	3343.97
Tana Toraja	2054.30	2054.00	1990.22
Luwu Utara	7502.68	7503.00	7502.58
Luwu Timur	6944.88	6945.00	6944.88
Toraja Utara	1151.47	1151.00	1215.55
Makassar	175.77	176.00	199.26
Parepare	99.33	99.00	99.33
Palopo	247.52	248.00	252.99
Sulawesi Selatan	127708.35	45765.00	46717.48

Selain memiliki keunggulan dari letak geografis tersebut, Sulawesi Selatan juga memiliki keunggulan lain dilihat dari sisi etnik budaya, dimana masyarakat Sulawesi Selatan yang terdiri dari berbagai etnik budaya memiliki nilai-nilai luhur yang diangkat dari nilai tradisional dan budaya lokal, dan secara universal dapat dipadukan dengan cara pandang global.

Populasi penduduk Sulawesi Selatan tahun 2020 tercatat lebih dari 9,07 juta jiwa yang mana dalam setiap 1 kilometer persegi rata-rata dihuni sebanyak 194 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki, dengan nilai rasio jenis kelamin sebesar 98,59 persen yang berarti dari setiap 100 penduduk perempuan di Sulawesi Selatan terdapat 98-99 penduduk laki-laki. Secara nasional, berdasarkan hasil SP2020 populasi penduduk Sulawesi Selatan menyumbang 3,36 persen dari total populasi penduduk Indonesia atau sekitar 45,61 persen dari total populasi penduduk yang mendiami Pulau Sulawesi. Kota Makassar sebagai Ibukota Provinsi masih menjadi wilayah dengan jumlah populasi terbanyak serta dengan tingkat kepadatan tertinggi dibandingkan dengan 23 kabupaten/kota lainnya yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Kota Makassar bertambah penduduknya sekitar 85 ribu jiwa dibandingkan dengan hasil pencatatan di tahun 2010 lalu.

Setelah 10 tahun beberapa wilayah bahkan mengalami penambahan penduduk lebih dari 20 persen, diantaranya Tana Toraja sebesar 27,01 persen, Palopo sebesar 24,84 persen, Luwu Timur sebesar 22,08 persen, dan Toraja Utara sebesar 20,45 persen. Jumlah penduduk usia produktif juga masih mendominasi wilayah Sulawesi Selatan dengan persentase sebesar 68,57 persen atau sebanyak 6,22 juta jiwa. Pada usia tersebut saat ini merupakan penduduk yang lahir pada tahun 2004-1954 atau bisa disebut dengan penduduk yang termasuk kategori generasi Z, milenial, generasi X, dan generasi *baby boomer*. Dengan komposisi tersebut, rasio ketergantungan penduduk Sulawesi Selatan tahun 2020 menjadi sebesar 45,84, yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 45-46 penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan 64 tahun ke atas).

Sulawesi Selatan juga menyimpan banyak potensi sumber daya alamnya, seperti pertanian, perkebunan, kelautan, dan lainnya yang tercatat sebagai penyumbang terbesar bagi produksi nasional bahkan dikenal dunia karena diekspor ke berbagai

negara. Kondisi geografis Sulawesi Selatan memudahkan akses dan sarana transportasi melalui darat, laut, dan udara dengan lokasi yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar sebagai gerbang transportasi wilayah lain. Pengembangan ekonomi berbasis kelautan menjadi fokus utama kota dan kabupaten di Sulawesi Selatan. Posisi Sulawesi Selatan akan memperkokoh tol laut untuk konektivitas dan logistik maritim. Hal ini mencakup revitalisasi dan pembangunan armada baru kapal nasional untuk angkutan barang dan penumpang, pelabuhan, dan industri galangan kapal. Pembangunan poros maritim harus diimbangi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di sepanjang wilayah pesisir ALKI, pulau-pulau kecil, dan wilayah perbatasan. Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu wilayah pesisir dan laut yang terletak di ALKI II (Selat Lombok-Selat Makassar).

B. Sektor Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, Provinsi Sulawesi Selatan

Sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan masih mendominasi perekonomian Sulawesi Selatan dengan kontribusi sekitar 21,70 persen dari seluruh sektor ekonomi di tahun 2020. PDRB lapangan usaha pertanian mengalami kontraksi sebesar 0,83 persen karena terdampak pandemi. Berbanding lurus dengan kontribusi ekonomi, penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian juga mendominasi lapangan usaha. 37,98 persen pekerja di Sulawesi Selatan di periode Februari 2021, bekerja di sektor pertanian. Diikuti sektor perdagangan 17,41 persen dan konstruksi 7,28 persen.

Berdasarkan hasil survei KSA, realisasi panen padi sepanjang Januari hingga Desember 2020 sebesar 0,98 juta hektar atau mengalami penurunan sekitar 33,93 ribu hektar (3,36 persen) dibandingkan 2019 yang mencapai 1,01 juta hektar. Puncak panen padi pada 2020 tidak mengalami pergeseran dibanding 2019. Pada 2020, puncak panen terjadi pada bulan Agustus, yaitu mencapai 0,19 juta hektar, sementara puncak panen pada 2019 terjadi pada bulan Agustus, yaitu sebesar 0,21 juta hektar. Melihat produksi daging, sapi menjadi jenis ternak dengan produksi daging tertinggi sebesar 15.310,68 ribu kg. Produksi daging unggas untuk ayam kampung 7.449.636 ton, ayam petelur 4.572.648 ton, ayam pedaging 842.720.052 ton, dan itik 1.713.036 ton.

Produksi perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan didominasi dari perikanan

tangkap. Dimana pada tahun 2019 mencapai 396.757 ton. Perikanan menjadi salah satu daya tarik masyarakat di Sulawesi Selatan yang digambarkan bahwa rumah tangga perikanan di tahun 2019 meningkat jika dibandingkan tahun 2018, dimana jumlah rumah tangga perikanan di 2019 meningkat 12.625 rumah tangga dibandingkan 2018.

Sementara untuk hasil perkebunan pada tahun 2020 di Sulawesi Selatan ialah kelapa sawit 273.712 ton, kelapa 58.497 ton, karet 1.320 ton, kopi 34.427 ton, kakao 106.582 ton, tebu 2.231 ton, dan tembakau 1.137 ton.

Nilai ekspor tahun 2020 Sulawesi Selatan tertinggi adalah komoditas ikan dan udang sebesar 137,99 juta US\$. Diikuti rumput laut dan ganggang lainnya sebesar 111,77 juta US\$, dan kakao sebesar 61,95 juta US\$. Dari sisi volume, ekspor ikan dan udang sebesar 18,40 ton, rumput laut dan ganggang sebesar 117,92 ton, kakao sebesar 16,09 ton, kopi teh dan rempah-rempah sebesar 15,35 ton, buah-buahan sebesar 13,79 ton, kayu barang dari kayu sebesar 49,23 ton, dan lak getah damar sebesar 14,36 ton.

Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (it) terhadap indeks harga yang dibayar petani (ib), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/ daya beli petani di pedesaan. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Nilai NTP<100 menunjukkan petani mengalami deficit, yaitu tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya. NTP Sulawesi Selatan 2019- 2020 masih di bawah 100 yang berarti perlu ada penanganan mengingat petani masih mengalami defisit.

C. Gambaran Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) merupakan salah satu kabupaten yang memiliki wilayah yang terdiri dari dataran rendah, pegunungan dan laut yang dikenal dengan 3 dimensi serta memiliki kompleksitas pengelolaan pembangunan, termasuk pembangunan di sektor kelautan dan perikanan.

Secara administrasi luas wilayah Kabupaten Pangkep adalah 12.362,73 km² yang terdiri dari luas daratan yaitu 898,29 Km² dan wilayah laut 11.464,44 km². Melalui pembangunan kelautan dan perikanan diharapkan potensi pesisir dan laut dapat dioptimalkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Luas wilayah laut 11.464,44 km² merupakan potensi perikanan yang sangat besar dengan produksi hasil tangkapan pada tahun 2021 sebesar 20.714,6 ton dengan jumlah RTP (Rumah Tangga Nelayan) sebanyak 9.812 dan jumlah nelayan 12,514 orang yang tersebar di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sedangkan potensi perikanan budi daya yaitu luas tambak ± 11.000 ha dengan produksi pada tahun 2021 sebesar 472.963 ton dengan jumlah petani tambak 6.254 RTP, yang terdiri dari petani tambak dan pembudi daya Rumput Laut. Disamping itu, pengolahan hasil perikanan juga berkontribusi dalam peningkatan produktivitas pelaku usaha perikanan dimana produksi hasil pengolahan tahun 2021 sebesar 215.455,5 ton melalui unit pengolahan Ikan (UPI) berupa: Daging Kepiting Rajungan, Bandeng Tanpa Duri, Ikan Kering, Bandeng Presto, Abon Ikan Bandeng, Naget Ikan Bandeng, dan Otak-otak Ikan Bandeng.

D. Gambaran Umum Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang sebagai salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan provinsi lain, yakni Sulawesi Barat. Sebelah utara Kabupaten Pinrang berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Sidenreng Rappang, sebelah selatan berbatasan dengan Kota Parepare, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar (Sulawesi Barat) dan Selat Makassar. Secara astronomis, Kabupaten Pinrang terletak antara 3°19' dan 4°10' Lintang Selatan dan antara 119°26' dan 119°47' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Pinrang 1961,77 km² atau 4,26 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan.

Kabupaten Pinrang terdiri dari daerah pantai, dataran, dan pegunungan. Daerah pantai terdapat di 22 desa/kelurahan di bagian barat, berbatasan dengan Selat Makassar, yang berada di Kecamatan Lembang, Duampanua, Cempa, Mattiro Sompe, Lanrisang, dan Suppa. Daerah pegunungan terdapat di 20 desa/kelurahan di bagian utara, yang berada di Kecamatan Lembang, Batulappa, dan Duampanua. Sedangkan 66 desa/kelurahan merupakan daerah dataran.

E. Profil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pinrang

1. Pertanian

Produksi tanaman sayur-sayuran terlihat bahwa cabai besar, cabai rawit, dan tomat adalah sayuran dengan produksi terbanyak daripada beberapa jenis lainnya. Pada tahun 2020, produksi cabai rawit mencapai 7871 kuintal dengan

luas panen 97 ha, kemudian produksi cabai besar mencapai 7696 kuintal dengan luas panen 72 ha. Produksi tanaman sayuran dan buah-buahan hanya ada semusim. Beberapa buah mengalami fluktuasi jumlah produksi selama rentang waktu 2018-2021 yaitu melon.

Kemudian untuk tanaman perkebunan terdapat 3 jenis komoditas tanaman perkebunan dengan produksi terbesar, antara lain: kakao, kelapa dalam, dan kopi robusta. Produksi kakao pada tahun 2021 mencapai 9.237 ton yang dipanen dari areal seluas 18.958 ha. Sedangkan komoditas tanaman pangan yang paling banyak dihasilkan di Kabupaten Pinrang antara lain: padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Produksi tanaman padi di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 mencapai 638.982 ton (meningkat dibandingkan tahun 2019 yaitu 589.515 ton) yang dipanen dari areal seluas 108.302 ha atau dengan produktivitas sebesar 5,90 ton/ha. Bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2017, produksi tahun 2019 mengalami penurunan dimana produksi tahun 2017 sebesar 629.909 ton dengan areal panen seluas 105.726 Ha atau dengan produktivitas sebesar 59,58 kw/ha.

2. Peternakan dan Perikanan

Beberapa ternak yang banyak ditemukan di Kabupaten Pinrang, antara lain: sapi potong, kerbau, kuda, kambing/domba, ayam, dan itik. Tabel 5.4.1 menyajikan populasi ternak pada tahun 2021. Pada tahun 2021, jumlah ayam sebanyak 5.967.851 ekor, terdiri dari 2.299.982 ekor ayam kampung (buras), 2.286.605 ekor ayam pedaging, dan 1.381.264 ekor ayam petelur. Sedangkan produksi perikanan di Kabupaten Pinrang tahun 2021 mencapai 39.745 ton. Bulan Juli menjadi bulan dengan produksi perikanan paling besar selama tahun 2021.

3. Kehutanan

Untuk sektor kehutanan, Kabupaten Pinrang memiliki luas kawasan hutan lindung tahun 2021 mencapai 64,82% dari jumlah luas kawasan hutan di Kabupaten Pinrang.

III. HASIL KUNJUNGAN

A. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

1. Latar Belakang

Urgensi kebutuhan SDM Kehutanan yang berkualitas dewasa ini kian mendesak di tengah penurunan nilai dan fungsi sumber daya hutan akibat terdegradasi dan terdeforestasinya hutan dan lahan. Selain itu, posisi sektor kehutanan di dalam pembangunan nasional tetap strategis dan masih menjadi tumpuan bagi pembangunan ekonomi maupun pembangunan lingkungan. Dari sisi pembangunan ekonomi, sektor kehutanan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan negara, dan perolehan devisa secara nyata. Dari sisi pembangunan lingkungan, sektor kehutanan diharapkan dapat menyediakan produk dan jasa ekologi. Selain itu pada konteks pembangunan lingkungan global, peran kehutanan sangat nyata dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang memberikan dampak pada tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Pemenuhan kebutuhan SDM di bidang kehutanan salah satunya dapat dicapai melalui menyelenggarakan Pendidikan Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang dititikberatkan pada peningkatan kualitas pendidikan vokasi, salah satunya adalah perbaikan sistem pendidikan, terutama revitalisasi sistem pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.

Penyelenggaraan SMK Kehutanan diharapkan dapat ditekankan pada peningkatan kerja sama dengan para pihak, baik dalam pengembangan kurikulum, pengelolaan *teaching factory*, praktek kerja lapangan, atau magang kerja serta penyerapan lulusan. Lebih lanjut kerja sama dengan para pihak merupakan salah satu upaya untuk memperkecil ruang antara kebutuhan dunia usaha atau dunia industri dengan lulusan SMK Kehutanan yang merupakan tenaga teknis di bidang kehutanan. Dengan menyelaraskan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha atau dunia industri, diharapkan penyerapan tenaga kerja di bidang kehutanan akan semakin meningkat.

2. Profil Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan Negeri Makassar

SMK Kehutanan Negeri Makassar dahulu bernama Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA) dibuka (kembali) pada tanggal 20 Juni 2008, kerja sama antara Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Pendidikan Nasional. SMK Kehutanan Negeri Makassar memiliki Visi: Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan yang berakhlak mulia, sehat, mandiri, disiplin dan berwawasan lingkungan, serta berdaya saing dalam rangka memasuki lapangan kerja global.

Wilayah layanan SMK Kehutanan Negeri Makassar meliputi 9 (sembilan) provinsi yang berada di kawasan tengah dan timur Indonesia, yaitu Provinsi: Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Bisnis Proses SMK Kehutanan Negeri Makassar ada 3 (tiga) yaitu: Input, Proses, dan Output.

- a. Input SMK Kehutanan Negeri Makassar, setiap tahunnya SMK Kehutanan Negeri Makassar hanya menerima 102 siswa. saat ini SMK Kehutanan Negeri Makassar memiliki dua jalur penerimaan peserta didik, yaitu jalur reguler dan jalur khusus, jalur khusus merupakan siswa yang berasal dari Kawasan Hutan). Peserta didik yang berasal dari Kawasan Hutan merupakan 50 persen dari jumlah keseluruhan peserta didik SMK Kehutanan Negeri Makassar. SMK Kehutanan Negeri Makassar telah menjalin kerja sama dengan 14 Taman Nasional, dan 8 Balai Konservasi SDAE, di wilayah layanan.
- b. Proses kegiatan belajar mengajar di SMK Kehutanan Negeri Makassar bersifat *Boarding School* (sekolah asrama) dimana selama pendidikan, peserta didik wajib tinggal di asrama. Kurikulum yang diterapkan di SMK Kehutanan Negeri Makassar adalah kurikulum 2013 untuk kelas XI (sebelas) dan XII (dua belas), sedangkan untuk kelas X (sepuluh) menggunakan kurikulum merdeka. Terdapat tiga kompetensi keahlian pada kurikulum 2013, yaitu Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (TIPH), Teknik Konservasi Sumber Daya Hutan (TKSDH), dan Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (TRRH), sedangkan untuk kurikulum merdeka hanya terdapat Program Keahlian Kehutanan. Selama proses pendidikan seluruh siswa mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama 7 (tujuh) bulan,

dengan target output sebagai berikut:

- 1) Kelas X (sepuluh), 1 (satu) bulan (Penguatan Profil dan Karakter Rimbawan);
 - 2) Kelas XI (sebelas), 2 (dua) bulan (Penguatan Pengelolaan Hutan Tingkat Tapak, Bekerja Sama dengan Perusahaan Kehutanan);
 - 3) Kelas XII (dua belas), 4 (empat) bulan (Penguatan pada Aspek Wirausaha Bidang Kehutanan);
- c. Output, serapan, dan sebaran alumni SMK Kehutanan Negeri Makassar di dunia kerja dan industri serta usaha sejak dari angkatan pertama sampai dengan angkatan ke 12 (dua belas), lebih dari setengah alumni atau 61% diantaranya telah bekerja, baik sebagai ASN maupun non-ASN, 22% melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik diploma maupun strata satu di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta, 3% diantaranya sebagai tenaga magang pada instansi pemerintah, sisanya 14% belum bekerja. Khusus untuk alumni angkatan 12 (dua belas) atau lulusan tahun 2022, 70% diantaranya telah terserap di dunia kerja dan industri serta usaha, sedangkan sisanya 29 (dua puluh sembilan) alumni belum bekerja. SMK Kehutanan Negeri Makassar tahun ini telah bekerja sama dengan Taman Nasional dan Balai Konservasi serta beberapa perusahaan untuk program Magang Wajib Alumni SMK Kehutanan Negeri Makassar, sehingga pada saat lulus 100% alumni terserap di dunia kerja, industri, dan usaha.

3. Rekomendasi:

- a. Memfasilitasi program keahlian baru yaitu Lingkungan Hidup ke Kementerian Pendidikan dan Ristek;
- b. Memfasilitasi program *link and match* untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Pendidik dan Kependidikan melalui program Pertukaran Guru/Magang Guru bekerja sama dengan perusahaan dan industri terkemuka pengelola Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia juga sekolah unggulan Luar Negeri (LN);
- c. Memfasilitasi upaya sinergitas penempatan alumni dengan regulasi bagi perusahaan yang bergerak di kehutanan dan lingkungan hidup, termasuk dengan Menpan-RB meningkatkan formasi ASN bidang kehutanan dan lingkungan hidup, khususnya dari lulusan SMK Kehutanan Negeri, termasuk

- juga Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup provinsi maupun kabupaten/kota;
- d. Peningkatan anggaran khususnya untuk mendukung program jalur KH, mulai dari bantuan transpor, matrikulasi, dan penambahan pamong siswa atau pembina harian siswa;
 - e. Peningkatan fasilitas sarana prasarana sekolah seperti gedung olahraga dan pengembangan *teaching factory*.

B. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke **Pelabuhan Perikanan Kabupaten Pangkep** PP Maccinibaji Maccini Baji, Desa Pundata Baji, Kec. Labbakang, Kab. Pangkep didapatkan beberapa informasi, diantaranya:

1. Profil Pelabuhan

a. Data Umum

Nama Pelabuhan	:	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Maccini Baji
Lokasi Pelabuhan	:	
- Alamat	:	Kampung Maccini Baji
- Desa/Kelurahan	:	Pundata Baji
- Kecamatan	:	Labakkang
- Kabupaten/Kota	:	Pangkajene dan Kepulauan
- Provinsi	:	Sulawesi Selatan

b. Kelembagaan

No.	Kelembagaan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1.	Status Pengelolaan	√		Provinsi Sulawesi Selatan (Pusat/Provinsi/Kabupaten/Swasta) ¹⁾
2.	Dasar Hukum	√		STATUS P3D UPTD PELABUHAN PERIKANAN KAB/KOTA KEPADA PROVINSI BERDASARKAN UU 23 THN 2014 Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Nomor: 523/206/DISKAN dan Nomor: 552.3/0098/DKP Tanggal 3 Januari 2019 No. Sertifikat: 0007/24-01-2017

c. Data Frekuensi Kunjungan Kapal (6 bulan terakhir) Tahun 2022

No.	Kategori Kapal Penangkap Ikan	Bulan					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
a.	Perahu Papan (Perahu Tanpa Motor)	-	-	-	-	-	-
b.	Motor Tempel (0-5 GT)	226	98	213	118	78	101
c.	Kapal Motor	446	405	417	441	357	381
	5 GT						
	5-10 GT						
	10 - 20 GT						
	20 - 30 GT						

d. Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Ikan (6 bulan terakhir) Tahun 2022

No	Uraian	Bulan					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
a.	Produksi (kg)	40243	29983	64440	44526	32636	52207
b.	Nilai Produksi (Rp)*000	477.320	684.750	1.140.330	1.091.160	756.069	1.270.122

e. Penyerapan Tenaga Kerja di Pelabuhan Perikanan (6 Bulan Terakhir) Tahun 2022

No.	Jenis Pekerjaan	Bulan					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
a.	Nelayan	692	503	630	559	435	482
b.	Non Nelayan **)	2790	3100	1488	2340	1953	2610
Total		3482	3603	2118	2899	2388	3092

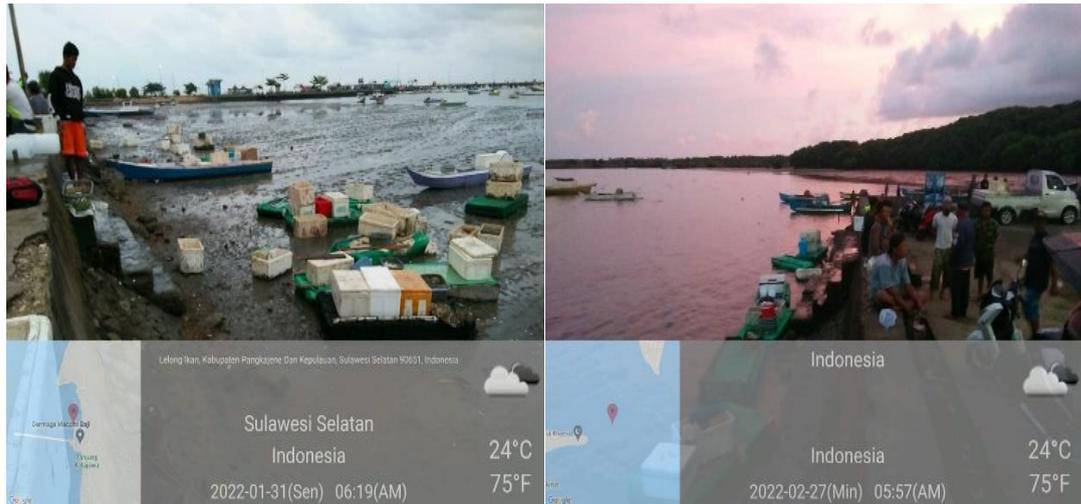
f. Kebutuhan Operasional di Pelabuhan Perikanan (6 bulan terakhir) Tahun 2022

No.	Jenis Perbekalan	Bulan					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
a.	Es Balok (kg)	9564	6075	4260	9830	10710	11430
b.	Solar (lt)	13980	12150	15990	22530	14940	11430
c.	Oli (lt)	904	1620	1065	472	1785	1905
d.	Bensin (lt)	2260	980	2150	2400	880	950
e.	Gas (lt)	300	320	340	330	350	360
f.	Air (lt)	14294	17695	14047	12242	12852	13716
g.	Garam (kg)	-	-	-	-	-	-

g. Data Dukung Lainnya

- 1) Kapasitas kolam pelabuhan perikanan: 200 Unit kapal
- 2) Industri pengolahan dan industry penunjang di dalam pelabuhan perikanan maupun disekitar pelabuhan perikanan.

h. Kondisi Operasional



(Dokumentasi kegiatan bongkar muat, kegiatan di PPI, dsb.)

2. Masalah Pokok yang Dihadapi dalam rangka Mengakselerasi Pembangunan Sektor Perikanan

- a. Perubahan status PPI Maccini Baji untuk kembali menjadi TPI dengan pertimbangan pendaratan ikan pada PPI tersebut lebih sedikit, karena nelayan lebih cenderung membawa hasil tangkapannya ke Makassar dengan pertimbangan bahwa jarak tempuh lebih dekat dan sekaligus nelayan dapat berbelanja kebutuhan pokok dan perlengkapan melaut yang lebih lengkap.
- b. Para pelaku usaha perikanan baik nelayan, pembudi daya ikan, maupun pengolah masih sulit mendapatkan BBM jenis solar dan pertalite, khususnya di wilayah kepulauan.
- c. Akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan juga menjadi masalah pokok karena sulitnya jasa perbankan dan LPMUKP (Lembaga Pembiayaan Mikro Usaha Kelautan Perikanan) untuk mengakses wilayah kepulauan.
- d. Tidak tersedianya pupuk subsidi anorganik dan organik sektor perikanan.
- e. Pendangkalan saluran tambak.
- f. Kondisi tanah dasar tambak berlumpur karena adanya tumpukan residu pestisida dan zat kimia lainnya.

- g. Terputusnya jaminan perlindungan nelayan dan pembudi daya dalam bentuk asuransi.
- h. Tidak tersedianya sarana rantai pendingin pascapanen di wilayah kepulauan.
- i. Masih kurangnya sarana penangkapan ikan bagi nelayan kecil.
- j. Masih banyaknya area tambak potensi penggaraman yang belum terakomodir dalam program PUGaR (Pengembangan Usaha Garam Rakyat).
- k. Pengolahan hasil perikanan belum sesuai dengan SOP.
- l. Masih minimnya sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan.
- m. Belum tersedianya sarana dan pPrasarana sentra kuliner.
- n. Tenaga penyuluh yang ada belum sebanding dengan luasan wilayah potensi perikanan.

3. Aspirasi Pemerintah Kabupaten Pangkep:

- a. Meminta persetujuan pengalihan perubahan status PPI Maccini Baji menjadi TPI Maccini Baji.
- b. Meminta penambahan pendingin pabrik es tenaga surya, SPBU, dan SPDN di wilayah Kecamatan Kepulauan.
- c. Meminta penambahan petugas pendamping LPMLUKP khusus untuk empat wilayah Kecamatan Kepulauan.
- d. Meminta adanya bantuan pupuk subsidi anorganik dan organik bagi pembudi daya ikan.
- e. Meminta bantuan alat berat excavator dan hand tractor untuk mengatasi masalah pendangkalan dan pengolahan tanah yang sudah jenuh akibat penumpukan pupuk kimia.
- f. Bantuan jaminan perlindungan nelayan dan pembudi daya dalam bentuk asuransi.
- g. Bantuan alat tangkap bagi nelayan kecil.
- h. Mengakomodir lahan-lahan tambak garam yang belum tersentuh oleh Program PUGaR dan berkelanjutan Program PUGaR.
- i. Bantuan bedah UPI dan peningkatan SDM Pengolah dan Pemasar Hasil-hasil Perikanan.
- j. Bantuan sarana dan prasarana pengolahan hasil-hasil perikanan.
- k. Program tugas pembantuan sentra kuliner hasil-hasil perikanan.

- I. Penambahan tenaga penyuluh perikanan sesuai dengan potensi perikanan sebanyak 36 orang.

C. BIDANG PERTANIAN

Diskusi dan tanya jawab terkait Ketersediaan Bahan Pangan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kejadian Hilangnya 500 Ton Beras di Gudang Perum Bulog Kabupaten Pinrang serta Isu-isu Strategis Pangan Lainnya, antara lain:

1. Komisi IV DPR RI

- a. Bagaimana kebijakan HPP tidak tetap, hukum *suplay-demand* pada saat panen raya harga gabah sangat murah demikian sebaliknya;
- b. Hilangnya beras di gudang Perum Bulog Kabupaten Pinrang bagaimana bisa terjadi, bagaimana dengan berita acara keluar masuknya beras di gudang, bagaimana dengan dokumennya, seperti apa pertanggungjawabannya;
- c. Perlu tindak lanjut terkait hilangnya beras di gudang Perum Bulog Kabupaten Pinrang;
- d. Impor beras yang dilakukan oleh pemerintah, menyebabkan serapan Perum Bulog dari petani tidak dapat terserap dengan optimal pada saat musim panen raya;
- e. Perum Bulog membeli dengan harga yang lebih rendah dari petani;
- f. Badan Pangan Nasional berencana akan menaikkan harga HPP, Perum Bulog menyerap beras dari petani;
- g. Kesewenang-wenangan Perum Bulog terhadap pengusaha penggiling beras;
- h. Perbedaan data antara Perum Bulog dengan Kementerian Pertanian;
- i. Harga komoditas jagung yang turun, diperlukan pengadaan gudang penyimpanan jagung khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat;
- j. Diperlukan pembangunan gudang beras di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat;
- k. Diharapkan tidak akan ada impor beras lagi dari pemerintah, sehingga beras yang diproduksi petani dapat terserap secara optimal;
- l. Bantuan manajemen pupuk di Provinsi Sulawesi Selatan;
- m. Pemerintah pusat menargetkan 300.000 ton untuk Provinsi Sulawesi Selatan, bagaimana realisasinya?

2. Tanggapan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian

- a. Juara nasional ke 4 (empat) se-Indonesia di tahun 2022, setelah Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah, produksi gabah kering menurut angka BPS 5,33 juta ton gabah kering atau naik sangat tinggi mencapai 4,6% (empat koma enam persen), demikian halnya dengan luas panennya juga tinggi yang tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan seperti Kabupaten: Wajo, Bone, Pinrang, Sidrap, Takalar, dan beberapa kabupaten lainnya;
- b. Sulawesi Selatan menuju pertanian presisi dimana lahannya digambar dengan poligon, bibitnya yang berkualitas sampai hasil akhir, peralatan yang memadai dan kapan menggunakan traktor, dan ketersediaan pupuk dan kapan menyemprot pupuk serta dengan akses KUR dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan bisa presibility dan dapat mencapai target produksi 215.000 ton. Berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya produksi Provinsi Sulawesi Selatan selalu melebihi target, dari 215.000 ton kemudian di-breakdown 158.000 ton.
- c. Data menggunakan satu data sesuai Undang-Undang BPS satu pintu data, sehingga jika ada perbaikan data, maka Kementerian Pertanian akan menyetorkan ke BPS, selanjutnya oleh BPS akan diperbaiki dan dipublikasikan. Dengan demikian sepenuhnya Kementerian Pertanian menggunakan data dari BPS;
- d. Pengertian surplus, defisit, dan stok menurut definisi Kementerian Pertanian. Surplus defisit adalah produksi dikurangi konsumsi net ekspor impor. Sedangkan stok adalah jumlah barang yang ada di Perum Bulog dan non Perum Bulog. Dengan demikian jika di media disebutkan bahwa stok beras nasional berkurang, maka hal tersebut menggambarkan stok beras di Perum Bulog, sementara stok beras yang lain ada di luar Perum Bulog, misalnya di penggilingan, di pasar, dan rumah tangga produsen.
- e. Mengenai harga beras, apakah berlaku hukum ekonomi *supply-demand*, ketika panen raya, maka harga akan turun atau sebaliknya, secara teori iya, namun di lapangan pada situasi tertentu, tempat tertentu, waktu tertentu terjadi anomali harga, terjadi anomali pasar, kenapa demikian, karena:
 - 1) Jarak produksi petani sampai ke konsumen panjang rantai pasoknya;
 - 2) Indonesia merupakan negara kepulauan, atau dikenal sentra produksi

- daerah yang tidak sentral (anomali);
- 3) Musiman, ada musim panen dan musim gadu;
 - 4) Struktur pasar, jumlah penggilingan besar sebanyak 1.000, jumlah penggilingan menengah 7.000, jumlah penggilingan kecil 160.000. Dengan demikian terjadi *market leader*, *pressmaker*, pemegang stok dominan bisa mengendalikan harga;
- f. Data Perum Bulog lima tahun terakhir, tahun 2018 pada tahun pertama 1,4 juta ton/tahun target setiap tahun sama tetapi realisasinya terus menurun, hal ini terjadi karena banyaknya kendala, salah satunya karena menyerap mudah namun untuk melepaskannya sangat sulit, dan HPP-nya naik. Saat musim panen pada bulan Maret-April terakhir menjadi kecil, target tidak tercapai atau di bawah 1 juta ton. Untuk itu, perlu dicarikan solusi pada saat musim panen, namun demikian Kementerian Pertanian pada sisi produksi, menjamin akan pasokan aman, data BPS surplus, dan ketersediaan cukup.

3. Tanggapan Direktur Human Capital Perum Bulog

- a. Realisasi pengadaan dalam negeri seluruh Indonesia Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Kanwil	Target 2021 (Str Beras)	Total realisasi	%	Target 2022 (Str Beras)	Total realisasi *)	%
		Jan-Des	str beras	1 Tahun	Jan-Des	str beras	1 Tahun
1	DKI JAKARTA & BANTEN	53.000	31.636	59,69%	53.200	16.089	30,24%
2	JABAR	270.000	117.069	43,36%	233.300	139.774	59,91%
3	JATENG	204.000	137.204	67,26%	203.700	114.425	56,17%
4	DI. YOGYA	74.000	55.548	75,07%	61.000	34.137	55,96%
5	JATIM	331.000	151.997	45,92%	303.000	172.204	56,83%
6	ACEH	12.600	12.090	95,95%	12.000	4.147	34,55%
7	SUMUT	27.500	22.579	82,11%	23.000	3.041	13,22%
8	RIAU & KEPRI	14.500	8.730	60,21%	12.700	3.885	30,59%
9	SUMBAR	11.000	2.951	26,82%	8.400	1.664	19,81%
10	JAMBI	8.000	14.360	179,51%	12.500	5.189	41,51%
11	SUMSEL & BABEL	109.000	67.219	61,67%	94.000	21.944	23,34%
12	BENGKULU	6.500	6.302	96,96%	8.200	864	10,54%
13	LAMPUNG	108.000	46.716	43,26%	94.500	31.905	33,76%
14	KALBAR	8.500	4.779	56,22%	7.400	2.265	30,61%
15	KALTIM & KALTARA	8.000	3.232	40,40%	8.700	2.192	25,20%
16	KALSEL	18.500	10.978	59,34%	16.500	2.648	16,05%
17	KALTENG	7.500	4.892	65,22%	8.700	5.053	58,08%
18	SULUT & GORONTALO	6.000	2.134	35,57%	8.400	4.415	52,56%
19	SULTENG	31.300	15.660	50,03%	29.000	8.501	29,31%
20	SULTRA	45.700	20.863	45,65%	36.000	27.925	77,57%
21	SULSELBAR	303.000	342.294	112,97%	264.300	276.926	104,78%
22	BALI	7.100	6.586	92,76%	5.400	9.488	175,70%
23	N.T.B	127.000	102.008	80,32%	112.600	78.076	69,34%
24	N.T.T	10.500	7.360	70,10%	9.000	4.650	51,67%
25	MALUKU & MALUT	6.200	442	7,13%	4.000	780	19,50%
26	PAPUA & PABAR	41.600	20.680	49,71%	32.000	8.831	27,60%
JUMLAH		1.850.000	1.216.311	65,75%	1.661.500	981.016	59,04%

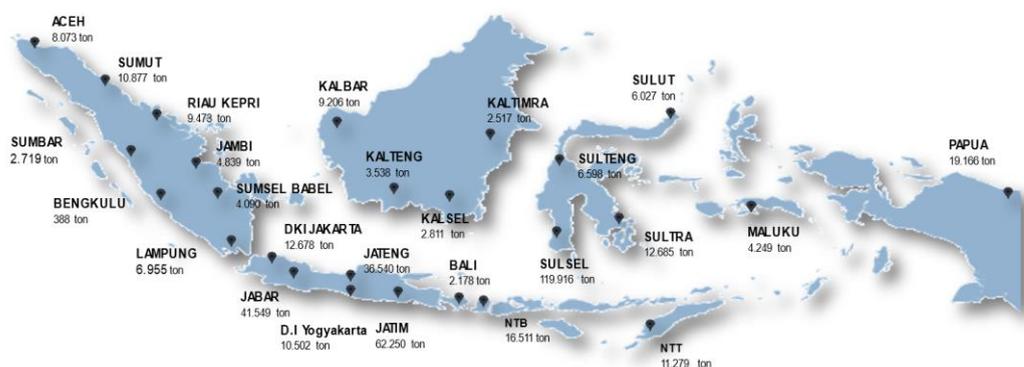
Perum Bulog menyampaikan bahwa pengadaan dilakukan guna menjaga stok CBP sebesar 1 s.d. 1,5 juta ton. Pengadaan dilakukan dengan

mempertimbangkan kebutuhan penjualan sehingga stok terjaga pada rentang yang diamanatkan Pemerintah. Realisasi pengadaan tergantung pada kebutuhan penjualan.

Kendala pengadaan: Pertama, permintaan beras yang meningkat sebagai dampak pandemi Covid-19 sehingga pasokan beras di produsen terbatas. Kedua, periode panen yang mundur dan tidak seragam antardaerah sehingga harga terjaga pada tingkat yang tinggi, beras dengan harga HPP menjadi sulit didapat.

Solusi dan Strategi Pengadaan: 1. Mengoptimalkan pengadaan melalui kerja sama jangka panjang bertarget kepada mitra pangan pengadaan. 2. Penambahan parameter kualitas guna mendapatkan gabah/beras dengan kualitas yang sesuai dengan amanat Pemerintah. 3. Meningkatkan peran *market intelligence* guna memonitor perkembangan harga gabah/beras di tingkat produsen dan konsumen.

b. Ketersediaan dan Sebaran Stok Beras Nasional



Per tanggal 15 Desember 2022 total stok beras yang berada di Gudang Bulog sebanyak 427.614 ton dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Cadangan beras pemerintah sebesar 215.408 ton.
- 2) Beras komersil sebesar 212.207 ton.

Selain stok beras, terdapat stok komoditas lain seperti: stok tepung terigu sebesar 215 ton, daging kerbau sebesar 337 ton, daging sapi 7 ton, telur 46 ton, gula pasir 7.458 ton, minyak goreng 5.889 ton, bawang putih 22 ton, bawang merah 27 ton, dan kedelai 1.469 ton.

c. Realisasi Pengadaan Setara Beras Dalam Negeri Kanwil Sulawesi Selatan

(dalam ton)

NO	KANWIL/KC/KCP	2021			2022		
		TARGET	REALISASI	% REAL vs TARGET	TARGET	REALISASI *)	% REAL vs TARGET
1	KANWIL SULSEL	-	-	-	-	-	-
2	KANCAB POLMAS	20.000	18.191	90,96%	18.251	11.191	61,32%
3	KANCAB PARE-PARE	55.000	78.361	142,48%	44.847	95.544	213,05%
4	KANCAPEM PINRANG	43.500	47.321	108,78%	31.866	30.908	96,99%
5	KANCAB SIDRAP	58.000	60.804	104,83%	38.898	42.358	108,90%
6	KANCAPEM SOPPENG	15.000	9.759	65,06%	18.058	10.686	59,18%
7	KANCAB WAJO	25.000	18.399	73,59%	27.508	19.501	70,89%
8	KANCAPEM BONE	18.000	25.302	140,57%	13.642	15.905	116,58%
9	KANCAB BULUKUMBA	21.000	18.252	86,92%	20.382	7.562	37,10%
10	KANCAPEM SELAYAR	500	146	29,18%	439	153	34,95%
11	KANCAB PALOPO	18.500	16.786	90,74%	26.849	16.665	62,07%
12	KANCAB MAKASSAR	22.000	44.233	201,06%	18.621	24.508	131,62%
13	KANCAB MAMUJU	6.500	4.739	72,90%	4.940	1.944	39,35%
TOTAL		303.000	342.294	112,97%	264.300	276.926	104,78%

Per tanggal 15 Desember 2022 disampaikan bahwa realisasi pengadaan setara beras dalam negeri Kantor Wilayah Bulog Sulawesi Selatan (Kanwil Bulog Sulsel) untuk tahun 2022 telah mencapai dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target pengadaan beras Kanwil Bulog Sulsel sebesar 264.300 dan telah terealisasi sebesar 276.926 ton. Selanjutnya untuk stok komoditas pangan lain terdapat stok gula pasir sebesar 345 ton, tepung terigu 4 ton, dan minyak goreng 959 kilo liter.

4. Tanggapan Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan-Barat

- Kasus pencurian beras sebanyak 500 ton di gudang Perum Bulog Kabupaten Pinrang terbongkar pada saat Perum Bulog melakukan opnam, yang dilakukan sebulan sekali. Oknum pelaku merupakan kepala gudang.
- Oknum pelaku pencurian beras telah dilakukan pemeriksaan, dikenai sanksi pemecatan oleh Perum Bulog, dilanjutkan dengan audit investigasi;
- Pelaku telah dilaporkan ke pihak yang berwajib, telah ditahan, dan dikenakan Undang-Undang Tipikor. Beras yang telah dicuri oleh pelaku telah dijual ke pihak lain.

IV. KESIMPULAN

- Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM LHK untuk mengajukan dan memfasilitasi program keahlian baru bidang Lingkungan Hidup ke Kementerian Pendidikan Nasional dan Ristek;

2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM LHK untuk memfasilitasi program *Link and Match* peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Pendidik dan Kependidikan melalui program Pertukaran Guru/Magang Guru bekerja sama dengan perusahaan dan industri terkemuka pengelola Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia serta sekolah unggulan Luar Negeri (LN);
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM LHK memfasilitasi sinergitas penempatan lulusan SMK Kehutanan Negeri dengan Kementerian PAN-RB untuk meningkatkan jumlah formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah pusat dan daerah bidang kehutanan dan lingkungan hidup, dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk perusahaan dan industri yang bergerak di bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM LHK untuk meningkatkan fasilitas sarana prasarana sekolah seperti gedung olahraga dan pengembangan *teaching factory* serta peningkatan anggaran, khususnya untuk mendukung program jalur KH;
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan masukan dan solusi terkait pengelolaan PPI Maccini Baji agar pengelolaan pelabuhan dapat dikelola secara optimal dan bersama-sama oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti aspirasi yang telah diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan, diantaranya: permasalahan solar, penambahan *cold storage* tenaga surya dan penambahan petugas pendamping LPMLUKP utamanya di wilayah kepulauan, permasalahan pupuk subsidi bagi petambak, pendangkalan, serta asuransi bagi nelayan, dan petambak ikan;
7. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian dan Perum Bulog untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan hasil panen guna menunjang panen raya, diantaranya melalui dukungan pembangunan gudang beras dan jagung di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat;

8. Komisi IV DPR RI meminta Perum Bulog untuk melakukan audit investigasi atas kejadian hilangnya 500 ton beras dan menindak tegas oknum pelaku pencurian beras di gudang Perum Bulog Kabupaten Pinrang;
9. Komisi IV DPR RI meminta Perum Bulog untuk mengaudit dan mengevaluasi sistem pengawasan dan manajemen pergudangan di semua gudang Perum Bulog di seluruh Indonesia.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang diperoleh dari berbagai pihak, baik dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama mitra kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja tersebut dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 21 Desember 2022

Ketua Tim,

Ttd.

Rusdi Masse Mappasessu
A-398

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN

A. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Peninjauan Fasilitas Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan Negeri Makassar dan Diskusi Pengembangan SDM Kehutanan di SMK Kehutanan Negeri Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

B. Bidang Kelautan dan Perikanan



Kunjungan Lapangan di Pelabuhan Perikanan dan Diskusi mengenai Sarana Prasarana Perikanan dan Permasalahan Nelayan di Kabupten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan

C. Bidang Pertanian



Peninjauan Gudang Perum Bulog di Kabupaten Pinrang dan Diskusi Ketersediaan Bahan Pangan di Provinsi Sulawesi Selatan

LIPUTAN MEDIA

A. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. <https://indonesianupdate.id/kunker-ke-makassar-komisi-iv-dpr-ri-jaga-kualitas-dan-mutu-lulusan-smk-kehutanan/>
2. <https://siberia.id/tag/komisi-iv-dpr-ri>
3. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42456/t/Komisi+IV+Minta+Pemerintah+Maksimalkan+Pemenuhan+Kebutuhan+SDM+di+Bidang+Kehutanan%C2%A0>
4. <http://smkknmakassar.bp2sdm.menlhk.go.id/>
5. <https://makassarterkini.com/read/td-350978/komisi-iv-dpr-ri-kunjungan-reses-ke-smk-kehutanan-makassar/>
6. <https://smkkehutananmakassar.sch.id/artikel/kunjungan-kerja-komisi-iv-dpr-ri>
7. <https://aspirasiwarga.com/tag/smk-kehutanan-negeri-makassar>
8. <https://retizen.republika.co.id/posts/193241/kunker-ke-makassar-komisi-iv-dpr-ri-jaga-kualitas-dan-mutu-lulusan-smk-kehutanan>
9. <https://sulsel.rilisnasiona.com/kunker-ke-smk-kehutanan-negeri-makassar-komisi-iv-dpr-ri-dukung-klhk-pemenuhan-kebutuhan-sdm-terampil-di-sektor-kehutanan>
10. <https://www.masmient.com/read/news-komisi-iv-dpr-ri-kunjungan-reses-ke-smk-kehutanan-makassar-186541/>

B. Bidang Kelautan dan Perikanan

1. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42475/t/Andi+Akmal+Dorong+Optimalisasi+Penyediaan+Sarpras+Nelayan+Program+KKP+di+Pangkep+Sulsel>

C. Bidang Pertanian

1. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42491/t/Komisi+IV+Minta+Pemerintah+Usut+Tuntas+Hilangnya+500+Ton+Beras+di+Gudang+Bulog+Pinrang>
2. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6467193/rms-pimpin-komisi-iv-dpr-sidak-bulog-pinrang-terkait-500-ton-beras-hilang>
3. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221218/12/1609674/dpr-minta-kasus-hilangnya-500-ton-beras-bulog-pinrang-diusut-tuntas>
4. <https://pedomanrakyat.com/rusdi-masse-pimpin-komisi-iv-dpr-ri-kunjungi-gudang-bulog-pinrang-imbah-hilangnya-500-ton-beras/>
5. <https://nasdem.id/2022/12/20/rusdi-masse-minta-bulog-usut-stok-beras-yang-hilang-di-pinrang/>
6. <https://voxtimor.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-2275985912/hilangnya-500-ton-beras-di-gudang-bulog-pinrang-ini-yang-dikatakan-komisi-iv-dpr-ri>
7. <https://www.republika.co.id/berita/rn1gjm380/komisi-iv-dpr-ri-reses-di-sulsel-stok-beras-aman>
8. <https://metro.djournalist.com/read/2022/12/17/24502/rms-imbau-usut-500-ton-beras-yang-hilang-di-gudang-bulog-kabupaten-pinrang>
9. <https://makassar.tribunnews.com/2022/12/17/komisi-iv-dpr-ri-usut-500-ton-beras-hilang-di-pinrang>
10. <https://headtopics.com/id/dpr-minta-kasus-hilangnya-500-ton-beras-bulog-pinrang-diusut-tuntas-33014444>